

Kekeringan, 592 Warga di Jasinga Bogor Kekurangan Air Bersih

JASINGA (IM) - Petugas BPBD menyalurkan air bersih ke Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu menyusul kekeringan dan krisis air bersih yang melanda masyarakat setempat. "Dikarenakan intensitas hujan yang menurun di wilayah tersebut sehingga mengakibatkan sumber mata air warga berkurang dan warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih di setiap harinya," kata Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jaludin, Kamis (8/6). Ia menyatakan, kondisi tersebut melanda empat

RT, yaitu RT 02, 03, 04, 05 RW 02. Total warga yang terdampak sebanyak 148 KK dengan 592 jiwa. "Volume pengiriman air bersih 10.000 liter dengan lokasi pengisian di PDAM Leuwiliang," ujarnya. Untuk sementara ini, kebutuhan air bersih untuk warga di lokasi tersebut sudah terpenuhi. Rencananya, petugas akan kembali menyalurkan air bersih ke desa lain yang juga mengalami kondisi serupa di wilayah Kecamatan Jasinga. "Rencana dilanjut untuk Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor," tuturnya. ● **gio**

Diduga Sebar Hoaks tentang Gibran, Oknum Guru ASN di SMKN Jember Dibina

JEMBER (IM) - BY, oknum guru ASN Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Jember, Jawa Timur diduga menyebarkan informasi bohong (hoaks) mengenai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di grup WhatsApp. Akibatnya, BY mendapatkan sanksi pembinaan dari Kepala Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Jember. Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Edy Cahyo Purnomo mengatakan, BY meneruskan sebuah video yang berisi informasi hoaks, yakni tentang tuduhan korupsi Bansos. Informasi hoaks di grup WhatsApp itu pun menyebar ke berbagai kalangan. Termasuk anggota DPRD Jember dari Fraksi PDI-P. "Ini adalah ASN guru yang menyebarkan, kami hearing dengan Cabang Dinas (Cabdin) agar memanggil guru ini," kata dia, Kamis (8/6). Dia menyesalkan tinda-

kan oknum guru tersebut karena tidak patut ditiru. Untuk itulah, DPRD memanggil cabang dinas agar memberikan sanksi pada guru tersebut agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Jember, Sugeng Trianto mengatakan pihaknya menyesalkan tindakan guru SMKN Jember tersebut. "Terkait oknum guru SMKN ini, sudah dilakukan pembinaan internal oleh kepala sekolah," kata Sugeng. Selain itu, kata dia, Cabdin Jember juga akan melakukan pemanggilan dan melakukan pembinaan di kantor. "Hari Senin akan kami panggil untuk dilakukan pembinaan secara bertahap," tambah dia. Menurut dia, apa yang telah dilakukan oleh oknum itu tidak baik untuk semua orang dan merugikan banyak pihak, bahkan institusi atau kedinasan. ● **pra**

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



PENANAMAN BIBIT BAKAU DI PESISIR PEKALONGAN

Sejumlah delegasi dari berbagai negara penerima dana hibah Adaptation Fund bersama pemerintah setempat menanam bibit bakau di Pesisir Pantai Kandang Panjang, Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (8/6). Adaptation Fund menyerahkan dana sebesar sekitar 5,8 juta dolar AS melalui lembaga kemitraan kepada Kota Pekalongan untuk penanganan rob dan pembangunan ketahanan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim yang salah satunya dengan penanaman bibit bakau di pesisir pantai.

TERTINGGI KETIGA DI JAWA BARAT

Pemilik Kendaraan di Kab. Bogor Banyak Yang Tak Bayar Pajak

Dari total jumlah kendaraan 2.100.000-an unit, 35 persen di antaranya atau 735.000-an unit kendaraan roda dua maupun roda empat termasuk dalam KTMDU," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jawa Barat, AKBP Lalu Wira Sutriana.

CIBINONG (IM) - Angka Kendaraan Tidak Melakukakan Daftar Ulang (KTMDU) di Kabupaten Bogor setidaknya mencapai 735.000 unit, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Jika dibandingkan 26 kota dan kabupaten lain di Provinsi

Jawa Barat, posisi Kabupaten Bogor berada di posisi ketiga tertinggi, dibawah Kota dan Kapaten Bekasi. "Dari total jumlah kendaraan 2.100.000-an unit, 35 persen di antaranya atau 735.000-an unit kendaraan roda dua maupun roda empat termasuk dalam KTMDU," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jawa Barat, AKBP Lalu Wira Sutriana. Mantan Waka Polres Banjar ini menerangkan hingga

Kamis pagi, banyak pemilik kendaraan yang membayar pajak ditempat pemeriksaan pajak kendaraan bermotor. "Sudah banyak pemilik kendaraan atau wajib pajak yang bayar pajak ditempat pemeriksaan, hingga Kamis pagi angka pembayaran hingga Rp 380 juta, Alhamdulillah," terangnya. AKBP Wira menjelaskan akan mengkaji lebih dalam

terkait wacana penambahan waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor, hal itu karena masih tingginya angka KTMDU. "Masih kami kaji terkait wacana itu, kami mengingatkan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor ini akan dikembalikan ke masyarakat Kabupaten Bogor dalam bentuk pembangunan," jelas AKBP Wira. ● **pra**

Rumah Warga di Cikalongwetan Terancam Longsor Susulan Akibat Hujan Deras

NGAMPRAH (IM) - Bencana longsor kembali menerjang. Sejumlah rumah warga di Cikalongwetan terancam longsor susulan di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sejauh ini, beberapa rumah mengalami kerusakan seperti yang terjadi di Kampung Pasirmalang RT 3/4 Desa Cipada mengalami rusak sedang dan satu rumah lainnya terancam. Beberapa rumah warga di Cikalongwetan terancam longsor susulan. "Peristiwa longsor tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WIB dan dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan tersebut. Saat ini, Beberapa rumah warga di Cikalongwetan terancam longsor susulan," kata Petugas lapangan BPBD KBB, Suheri saat dihubungi, Kamis (8/6). "Hujan yang mengguyur dan mengakibatkan tanah amblas sehingga pondasi, bangunan

terbawa dan rumah ambruk," sambungnya. Suheri menyebut, rumah yang terdampak longsor dan mengalami rusak sedang merupakan milik warga atas nama Cicih (60). "Sekarang satu rumah atas nama Ijoh (40) yang ditempati oleh enam jiwa terancam," tambahnya. Saat ini, lanjut Suheri, aparat kewilayahan dan masyarakat setempat bergotong royong membersihkan puing rumah yang roboh. "Kami berkoordinasi dengan pihak kewilayahan dan warga masyarakat bergotong royong membersihkan puing rumah," katanya. Meski begitu, Suheri menilai, jika melihat kondisi rumah tersebut longsor susulan masih berpotensi terjadi saat hujan deras tiba. "Akibat peristiwa ini korban terdampak longsor membutuhkan bantuan logistik dan juga terpal," tandasnya. ● **pra**



KERAJINAN CENDERAMATA PERNIKAHAN Pekerja menyelesaikan pesanan cenderamata keranjang bunga pernikahan di Amora Craft and Studio, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/6). Usaha kerajinan cenderamata pernikahan berbahan bunga segar, palsu dan kering tersebut mampu memproduksi sebanyak 20-30 macam pesanan per harinya dengan harga dijual dari Rp100 ribu hingga Rp2 juta yang dipasarkan melalui jaringan toko daring ke sejumlah kota di Indonesia.

Peningkatan Program P2WKSS Agar Perempuan Tangsel Semakin Sejahtera

TANGSEL (IM) - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangsel menggelar rapat koordinasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), di kantor Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kamis (8/6). Kegiatan ini mengambil tema 'Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah'. Kepala DP3AP2KB Kota Tangsel, Khairati, dalam sambutannya mengatakan, rapat koordinasi P2WKSS diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan baik di pendidikan, kesehatan dan ekonomi. "Sehingga kita berharap para perempuan di Kelurahan Lengkong Karya dan pada umumnya perempuan Tangsel, bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga masing-masing kondisi lingkungan," ujar Khairati. Khairati mengungkapkan, diharapkan juga hasil akhir dari rapat koordinasi P2WKSS, semua masyarakat yang memiliki persoalan

keluarga bisa diatasi, dibantu dan dicarikan jalan keluarnya melalui rapat koordinasi tersebut. "Nanti kita minta ke OPD-OPD terkait atas persoalan ini. Contohnya misalnya jika ada anak putus sekolah, kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian jika ada anak-anak stunting, ibu hamil beresiko tinggi kita berkoordinasinya dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan lingkungan dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan lain-lain," ujarnya. Khairati berpesan agar seluruh perempuan di Tangsel ikut berperan aktif dalam dalam menggerakkan P2WKSS. Khairati menambahkan, dari sisi pemberdayaan ekonomi, pihaknya juga akan membantu perempuan-perempuan dalam modal usaha dan pelatihan kewirausahaan. Dikatakannya, Kelurahan Lengkong Karya akan menjadi pilot project untuk semua program P2WKSS agar program tersebut bergerak bersama-sama. "Dari data-data yang kita dapat di Kelurahan Lengkong Karya sudah kita pe-takan setahun lalu," tandasnya. ● **pp**

Plt Bupati Iwan Setiawan Optimis KLA Bisa Terwujud Sinergitas dan Kolaboratif

BOGOR (IM) - Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengharapkan adanya sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar Kabupaten Bogor bisa menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023 dengan mengikuti kegiatan verifikasi lapangan evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 secara online oleh tim verifikasi dari DP3AKB Jawa Barat, di Ruang Rapat I Setda, yang digelar Rabu (7/6). Dalam kesempatan ini Iwan Setiawan mengungkapkan, bahwa verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim verifikasi secara daring ini menjadi sarana untuk memotivasi Pemkab Bogor juga dalam melaksanakan upaya bersama guna mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Ini agar hak anak tumbuh berkembang dengan baik secara jasmani rohani dan sosial terpenuhi. Agar anak dapat berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus melindungi anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. "Secara pribadi dan atas nama Pemkab Bogor saya mengucapkan terimakasih kepada tim verifikasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Juga berterima kasih ke-

pada semua pihak yang telah mendukung dan bekerjasama untuk berupaya mewujudkan Kabupaten Bogor Layak Anak. Sehingga kita tiba pada tahap evaluasi pada hari ini," terang Iwan Setiawan. Sebagaimana diketahui bahwa, berdasarkan data BPS tahun 2022 di Kabupaten Bogor terdapat sebanyak 1.852.756 anak berusia 0-19 tahun. Sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk memberikan pelayanan yang merata dan berkualitas khususnya dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak. Beragam kebijakan strategis dan berkelanjutan dikembangkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dengan mengintegrasikan komitmen stakeholder, sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan. Tidak hanya itu, beberapa regulasi telah diterbitkan untuk menguatkan kelembagaan antara lain. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Perda Kabupaten Bogor Nomor 5 tahun 2018 tentang Kesehatan Ibu dan Anak.

Kemudian Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 39 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Perbup Nomor 67 tahun 2021 tentang Sistem Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat. Lalu ada Keputusan Bupati Nomor 476/376/KPTS/2017 tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Bogor. Serta Keputusan Bupati Nomor 463/455/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bogor periode tahun 2020-2025. Bahkan saat ini Pemkab Bogor sedang menyusun Perda Kabupaten Bogor tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Perda Kabupaten Bogor tentang PAUD Holistik Integratif, di mana saat ini masih dalam tahap pembahasan DPRD. "Kami menyadari mewujudkan Kabupaten Bogor Layak Anak merupakan upaya yang penuh dengan tantangan, berkelanjutan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu kami harap masukan dari tim verifikasi menjadi motivasi bagi kami untuk mampu mewujudkan Kabupaten Bogor Layak Anak," ucapnya. ● **gio**



Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan, berharap KLA bisa terwujud di Kabupaten Bogor.

Lahan Kebun Binatang Segera Diambil Alih Pemkot Bandung

BANDUNG (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera mengambil alih lahan Kebun Binatang Bandung. Hal ini sejalan dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah (BMD) yaitu dengan mengamankan secara fisik, administrasi, maupun hukum, termasuk lahan Kebun Binatang Bandung. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung, Agus Slamet Firdaus mengatakan, Pemkot Bandung secara sah memiliki lahan seluas 13,9 hektar tersebut dari berbagai bukti yang saat ini dimiliki. Maka setelah tahapan persiapan sudah selesai, Pemkot Bandung secepatnya menyegel dan mengambil alih pengelolaan kebun binatang. Seperti diketahui, Pemkot Bandung telah dinyatakan sebagai pemilik sah lahan Kebun Binatang Bandung pada 2 November 2022 lalu oleh Pengadilan Negeri Bandung. Selain itu, Pemkot Bandung juga dinyatakan menang banding pada 14 Februari 2023 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 08/pdt/2023/Pt.Bdg. "Pihak Yayasan Margasatwa Tamansari yang notabene pihak tergugat III yang

mengajukan kasasi sehingga Pemkot Bandung sedang merencanakan pengambilalihan kebun binatang secepatnya," kata Agus Slamet Firdaus. Berdasarkan data, tunggakan sewa Kebun Binatang Bandung per April 2023 sebesar Rp17.157.131.766 atau sekira Rp17,1 miliar. Sebagai pengingat, Yayasan Margasatwa Tamansari pada tahun 1970 telah membayar uang sewa lahan hingga 2007. Lalu pada 2008, mereka belum membayar uang sewa hingga pada 2013. Lalu pada 2013, pihak yayasan mengajukan izin sewa. Akan tetapi izin tersebut belum dapat diproses karena pihak yayasan belum melunasi biaya tunggakan 5 tahun kebelakang. Nilai tunggakan tersebut pun belum dilunasi hingga tahun 2023, di mana jumlahnya kini telah mencapai sekitar Rp17,1 miliar. Selanjutnya, Agus menyebut langkah-langkah pengamanan Kebun Binatang Bandung, Pemkot akan didampingi oleh Kejati Jabar dan Korsupgah KPK-RI. "Sejauh ini Alhamdulillah semuanya berjalan positif, dan memang ini bergantung dari SOP yang nanti akan dijalankan oleh Satpol PP," ucapnya. ● **pra**